

Laporan Kinerja
KPKNL Samarinda

Menuju Stabilitas Ekonomi
Tetap Optimis & Waspada

2022



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL SAMARINDA



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda Tahun 2022 dengan sistematika yang ditentukan.

Kami harapkan LAKIN ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Samarinda. Kepada semua pegawai yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja KPKNL Samarinda, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Samarinda, 7 Februari 2023

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Samarinda



Ditandatangani secara elektronik
Bagus Kurniawan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	1
1. Tugas dan Fungsi	1
2. Struktur Organisasi	2
B. PERAN STRATEGIS INSTANSI	3
1. Pengelolaan Kekayaan Negara.....	3
2. Pelayanan Penilaian.....	4
3. Pengurusan Piutang Negara	4
4. Pelayanan Lelang	5
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
B. PERJANJIAN KINERJA	11
C. PENGUKURAN KINERJA.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN ORGANISASI	21
1. Kinerja KPKNL Samarinda Tahun 2018-2022	25
2. Upaya dalam Rangka Pencapaian Kinerja	27
3. Evaluasi dan Analisis Keberhasilan Kinerja.....	28
4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
5. Program/Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja	32
6. Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko	33
7. Rencana Aksi	34
B. REALISASI ANGGARAN	35
BAB IV PENUTUP	36
A. SIMPULAN.....	36
B. HAMBATAN DAN HARAPAN.....	36
LAMPIRAN	39

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Dalam rangka pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), salah satu hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Indikator peningkatan kinerja instansi pemerintah dapat ditilik melalui ukuran pengelolaan keuangan yang sehat dan modern, pengukuran kinerja dengan indikator capaian, dan keterkaitan kegiatan dengan program instansi.

Dinamika organisasi merupakan salah satu faktor yang tak terelakkan dalam perkembangan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Seiring perkembangan teknologi serta digitalisasi, penyesuaian peta proses bisnis Kementerian Keuangan, dan arah kebijakan kelembagaan secara nasional, Kementerian Keuangan khususnya DJKN terus melakukan reformasi birokrasi dan perbaikan kelembagaan. Penyesuaian organisasi pemerintah sesuai dengan peta proses bisnis tersebut dilakukan agar instansi DJKN mampu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan berdasarkan kebutuhan pelayanan di masa depan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;

- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

2. Struktur Organisasi

Guna melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan sebelumnya, telah dilakukan penataan organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adapun struktur organisasi KPKNL terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi KPKNL dengan 1 (satu) subbagian, 4 (empat) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing di bawah Kepala Kantor dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi KPKNL

KPKNL Samarinda berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 6, Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang kekayaan negara,

penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Samarinda dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan didukung oleh 1 (satu) subbagian, 4 (empat) seksi, beserta Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang kerja yang ditetapkan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh KPKNL Samarinda dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan organisasinya sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang dirinci sesuai jabatan dan kedudukan sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| i. Kepala Kantor | : 1 (satu) orang |
| ii. Subbagian Umum | : 7 (tujuh) orang |
| iii. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara | : 6 (enam) orang |
| iv. Seksi Piutang Negara | : 3 (tiga) orang |
| v. Seksi Hukum dan Informasi | : 4 (empat) orang |
| vi. Seksi Kepatuhan Internal | : 3 (tiga) orang |
| vii. Jabatan Fungsional Pelelang | : 3 (tiga) orang |
| viii. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah | : 4 (empat) orang |

B. PERAN STRATEGIS INSTANSI

Setiap pelayanan pada KPKNL Samarinda merupakan bentuk implementasi peran strategis DJKN guna pencapaian tujuan pada tiap bidang kerja. Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Samarinda memiliki peran strategis dalam melaksanakan implementasi kebijakan terkait bidang-bidang tersebut. Tugas dan fungsi tersebut merupakan sarana organisasi dalam menjalankan tugas yang diemban demi mewujudkan tujuan organisasi, sesuai dengan kerangka visi dan langkah misi organisasi DJKN. Lebih lanjut, tugas dan fungsi KPKNL Samarinda dijabarkan dalam peran strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai instansi vertikal DJKN yang berperan dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Samarinda memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, penatausahaan kekayaan negara. Dalam kaitannya dengan fungsi DJKN sebagai *asset manager*, KPKNL Samarinda mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, serta penghematan belanja modal dan belanja

pemeliharaan. KPKNL Samarinda berperan membantu satuan kerja instansi vertikal kementerian/lembaga untuk menciptakan penatausahaan barang milik negara (BMN) yang tertib hukum, tertib fisik dan tertib administrasi.

Untuk menuju optimalisasi tersebut KPKNL Samarinda berperan aktif dalam penertiban Barang Milik Negara (BMN) pada tiap satuan kerja (satker) dalam wilayah kerja dengan tujuan utama sebagai berikut:

- a. Melakukan pemutakhiran pembukuan BMN,
- b. Mewujudkan penatausahaan BMN di seluruh satuan kerja (satker) Pemerintah Pusat pada wilayah kerja KPKNL Samarinda,
- c. Melakukan tindak lanjut penatausahaan dan pengelolaan BMN yang tertib dan optimal.

Saat ini, peran KPKNL Samarinda menjadi semakin strategis dikarenakan sebagian wilayah kerja KPKNL Samarinda direncanakan akan menjadi calon Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPKNL Samarinda dalam pengelolaan kekayaan negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, KPKNL Samarinda terus berupaya meningkatkan kinerja yang baik khususnya dalam hal pengelolaan kekayaan negara agar dapat menghasilkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara yang optimal.

2. Pelayanan Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi. Penilaian dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan BMN lain yang berada di lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi di bidang penilaian. Hasil penilaian kekayaan negara tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, pemindahtanganan BMN, dan pengurusan piutang negara (penilaian barang jaminan). Dengan demikian, hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien.

3. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab lain yang sah. Akan tetapi, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, piutang

macet yang berasal dari BUMN tidak diserahkan lagi pengurusan kepada PUPN melalui KPKNL, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap Piutang Negara yang telah diserahkan dan Piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah pusat maupun daerah.

4. Pelayanan Lelang

Pelayanan Lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Secara istilah, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului adanya Pengumuman Lelang. Selain itu, lelang merupakan bentuk pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan yang telah dilekatkan Hak Tanggungan dan eksekusi terhadap putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mengedepankan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. KPKNL Samarinda dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat selalu mengutamakan pelaksanaan lelang yang transparan, akuntabel, kompetitif, dan efisien. Diharapkan dengan semakin berkembangnya teknologi, khususnya terkait pengembangan *e-auction* dan *platform marketplace auction*, lelang dapat menjadi sarana transaksi pilihan masyarakat serta dapat berperan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara, KPKNL Samarinda memperoleh hasil berupa Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad). Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang memperoleh hasil berupa Bea Lelang termasuk Biaya Administrasi Balai Lelang yang selanjutnya disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan senantiasa memberikan pelayanan yang prima, KPKNL Samarinda diharapkan dapat menghasilkan PNBP dan merealisasikan potensi PNBP dari hasil pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, dan pengelolaan kekayaan negara. Sepanjang tahun 2022, KPKNL Samarinda telah berperan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana uraian tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada secara optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara. Salah satu kondisi yang menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 adalah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia.

Berbagai upaya pencegahan penyebaran *Novel Coronavirus* telah dilakukan mengingat virus tersebut tidak hanya membahayakan kesehatan manusia tetapi juga dapat mengganggu



stabilitas perekonomian dan sistem keuangan. Sebagai respons atas hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Lebih lanjut, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Pandemi *Covid-19* juga memberikan dampak pada proses bisnis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan, penyesuaian proses bisnis terkait lelang dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan sekaligus melindungi pegawai dan *stakeholders* di masa pandemi melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Lelang pada KPKNL dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Selain itu, penyesuaian proses bisnis terkait Piutang Negara juga dilakukan melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Pengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Selanjutnya, proses bisnis terkait pelayanan Penilaian juga dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Penilaian dan Analisis di Bidang Penilaian dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

Mengingat dampak pandemi *Covid-19* diperkirakan masih akan dirasakan selama beberapa tahun ke depan, Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai dokumen perencanaan jangka menengah telah mencantumkan berbagai respons yang diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan pandemi *Covid-19*. Respons tersebut berupa strategi-strategi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dirumuskan untuk mencapai kondisi-kondisi yang diinginkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra ini. Strategi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan DJKN. Selain dari sisi arah kebijakan dan strategi, target pada indikator kinerja dalam Renstra ini juga mempertimbangkan kondisi terkini yang diperkirakan akan berdampak pada realisasi target kinerja sehingga diperoleh proyeksi yang lebih realistis, mengingat pandemi *Covid-19* akan berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi nasional dalam jangka menengah. Perubahan asumsi dan skenario dalam perhitungan

indikator menjadi salah satu pokok perhatian dalam merumuskan target yang digunakan sebagai indikator kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN yaitu *"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."* Pengertian profesional dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pengelola Kekayaan Negara diharapkan dapat memiliki karakter kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan, dan adaptif. Penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Kontributif** berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional;
- b. **Instrumental** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif, dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi;
- c. **Otoritatif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan di replikasi oleh manajer aset lain di level nasional dan internasional.
- d. **Berkelanjutan** diwujudkan melalui peningkatan tata kelola dan nilai tambah aset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum;
- e. **Adaptif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya;

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;

2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; dan
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; dan
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh DJKN. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi DJKN yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial

Kondisi yang ingin dicapai dalam Arah Kebijakan ini adalah menjadi

- a. pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal, serta
- b. pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal adalah sebagai berikut.

- a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh Kementerian/Lembaga
- b. Optimalisasi pengelolaan piutang negara
- c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara (Omnibus Law)
- d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya adalah melalui

- a. peningkatan kapasitas SDM, perbaikan bisnis proses dan perangkat analisis Investasi Pemerintah
- b. *cross function* unit vertikal DJKN/Kementerian Keuangan (DJP/DJBC/DJPB) dan SMV Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan program kerja SMV.

2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah pengelolaan lelang yang optimal. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah dengan

- a. pelaksanaan *e-Auction* yang mengakomodasi prinsip-prinsip *ecommerce* baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan *startup* di bidang *marketplace*, dan
- b. pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern.

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan arah kebijakan ini adalah penilaian yang berkualitas. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut adalah

- a. pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara

b. peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah:

- a. organisasi dan SDM yang optimal,
- b. sistem informasi yang andal dan terintegrasi,
- c. pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, serta
- d. komunikasi publik yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah melalui:

- a. restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN;
- b. penguatan penyedia tenaga fungsional dan profesional bersertifikasi; dan
- c. pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah

- a. transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan *IT-Based Service* Kekayaan Negara,
- b. pengembangan pusat data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan, dan
- c. peningkatan kapabilitas tata kelola TIK DJKN.

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DJKN melaksanakan program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, DJKN harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat Kantor Vertikal. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dengan adanya penataan organisasi sebagai salah satu pilar dalam reformasi birokrasi, diharapkan bahwa pencapaian target penerimaan negara dan pelayanan kepada masyarakat akan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Untuk mendukung hal tersebut, setiap kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diinstruksikan untuk menetapkan indikator dan target kinerja yang menjelaskan keberhasilan pencapaian kinerja baik berupa hasil (*output*) maupun manfaat (*outcome*). Penetapan indikator dan target kinerja tersebut dikenal sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perencanaan kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan prima dengan tetap menjaga integritas dan

mempersiapkan kinerja terbaik di lingkungan instansi tersebut berada. Dalam mengemban tugas dan fungsi, KPKNL Samarinda mempunyai **visi dan misi** yang sejalan dengan visi dan misi Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara yang merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN yaitu, **”Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”**

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, KPKNL Samarinda menuangkan perencanaan kinerja tahun 2022 dalam sebuah Kontrak Kinerja KPKNL Samarinda Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dan Kepala KPKNL Samarinda sebagai berikut.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala KPKNL Samarinda, akan:

1. melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini;
2. bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan; dan
3. menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PETA STRATEGI



Gambar 2. Peta Strategi KPKNL Samarinda Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,5 (Skala 5)
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	92
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%
9	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
10	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
		10b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		10c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
		11b-CP Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp190.828.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp10.156.000
2. Pengelolaan Aset	Rp180.672.000
Dukungan Manajemen	Rp1.637.446.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp6.580.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.616.674.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp3.920.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp10.272.000

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,5	4,5
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang Disertifikasi	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
6b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
7	Edukasi yang Efektif							
7a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	-	92	92	-	92	92	92
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Organisasi yang <i>Fit for Purpose</i>							
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	-	-	-	-	-	85	85
10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal							
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	100%	100%



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output / Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian / Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelan	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1 Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Seksi PKN	-
				Q2 Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3 Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

SASARAN KERJA PEGAWAI

No.	Rencana Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Produktivitas Lelang	36%



No.	Rencana Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
5	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,5
6	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
7	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
8	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
9	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
10	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
11	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
12	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
13	Edukasi yang Efektif	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	92
14	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%
15	SDM yang Kompeten	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
16	Organisasi yang <i>Fit for Purpose</i>	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	85
17	Organisasi yang <i>Fit for Purpose</i>	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
18	Organisasi yang <i>Fit for Purpose</i>	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
19	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
20	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja DJKN Tahun 2022, DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis sebagai berikut.

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *minimize*

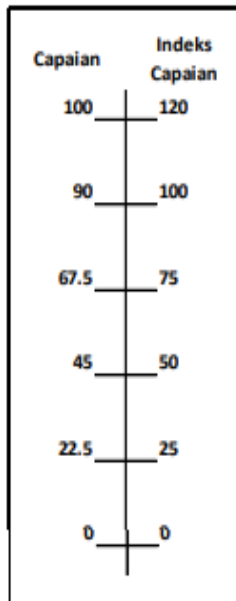
$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *stabilize*

$$I_n = I_{n-1} + \frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} (C_n - C_{n-1})$$

Grafik :



I_n = Indeks capaian

I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya

I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya

C_a = Capaian awal = Realisasi/Target x 100

C_n = Capaian

- **Apabila Realisasi > Target**, maka

$$C_n = 100 - (C_a - 100)$$

note: C_a maksimum adalah 200

- **Apabila Realisasi < Target** maka $C_n = C_a$

C_{n-1} = Angka Capaian di bawah C_n

C_{n+1} = Angka Capaian di atas C_n

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam sub bab ini disajikan capaian kinerja KPKNL Samarinda untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPKNL Samarinda sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPKNL Samarinda. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut.

K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	PoI/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	33,40%	70,45%	70,45%	96,36%	96,36%	143,59%	143,59%	
Capaian	334,04%	234,83%	234,83%	160,63%	160,63%	143,59%	143,59%	

K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1b-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	PoI/KP
Target	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%	MAX/ TLK
Realisasi	40,82%	46,07%	46,07%	45,94%	45,94%	49,45%	49,45%	
Capaian	204,08%	184,28%	184,28%	153,12%	153,12%	137,36%	137,36%	

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	PoI/KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	41,92%	92,85%	92,85%	112,64%	112,64%	155,33%	155,33%	
Capaian	209,58%	232,11%	232,11%	160,91%	160,91%	155,33%	155,33%	



K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	42,54%	73,60%	73,60%	114,38%	114,38%	442,99%	%	
Capaian	170,18%	147,20%	147,20%	192,51%	192,51%	442,99%	%	

K-Wide	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	4,5	4,5	MAX/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4,79	4,79	
Capaian	-	-	-	-	-	106,44%	106,44%	

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%	MAX/ TLK
Realisasi	-	70,96%	70,96%	84,60%	84,60%	78,98%	78,98%	
Capaian	-	141,92%	141,92%	153,81%	153,81%	121,51%	121,51%	

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4b-CP Persentase Bidang tanah BMN yang Disertifikasi							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	22,09%	33,74%	33,74%	68,71%	68,71%	105,52%	105,52%	
Capaian	110,43%	84,36%	84,36%	114,52%	114,52%	105,52%	105,52%	

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	31,75%	64,75%	64,75%	116,25%	116,25%	127,50%	127,50%	
Capaian	127,00%	85,94%	85,94%	155,00%	155,00%	127,50%	127,50%	



K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	PoI/KP
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	16,00%	85,94%	85,94%	89,71%	89,71%	104,60%	104,60%	
Capaian	160,00%	214,86%	214,86%	119,61%	119,61%	104,60%	104,60%	

K-Wide	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	PoI/KP
Target	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	MAX/ TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	PoI/KP
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	MAX/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	6b-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	PoI/KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	MAX/ TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	

K-Wide	Edukasi yang Efektif							
	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	PoI/KP
Target	-	92	92	-	92	92	92	MAX/ TLK
Realisasi	-	96,08	96,08	96,08	96,08	96,49	96,49	
Capaian	-	104,43%	104,43%	-	104,43%	104,88%	104,88%	



K-Wide	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara						
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	PoI/KP
Target	-	40%	40%	-	40%	85%	85%	MAX/ TLK
Realisasi	-	63,84%	63,84%	84,91%	84,91%	92,45%	92,45%	
Capaian	-	159,57%	159,57%	-	212,28%	108,77%	108,77%	

K-Wide	SDM yang Kompeten							
	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai						
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	PoI/KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	34,81%	70,37%	70,37%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	232,10%	175,93%	175,93%	160%	160%	120%	120%	

K-Wide	Organisasi yang Fit For Purpose							
	10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM						
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	PoI/KP
Target	-	-	-	-	-	85	85	MAX/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	97,39	97,39	
Capaian	-	-	-	-	-	114,58%	114,58%	

K-Wide	Organisasi yang Fit For Purpose							
	10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja						
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	PoI/KP
Target	-	-	-	-	-	80	80	MAX/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	98,13	98,13	
Capaian	-	-	-	-	-	122,66%	122,66%	

K-Wide	Organisasi yang Fit For Purpose							
	10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator						
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	PoI/KP
Target	90	90	90	90	90	90	90	MAX/ TLK
Realisasi	100	99,95	99,95	99,92	99,92	99,91	99,91	
Capaian	111,11%	111,06%	111,06%	111,03%	111,03%	111,01%	111,01%	

K-Wide	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
	11a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	MAX/ TLK
Realisasi	100%	99,92%	99,92%	99,95%	99,95%	95,97%	95,97%	
Capaian	104,71%	104,63%	104,63%	104,66%	104,66%	100,49%	100,49%	

K-Wide	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
	11a-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	180,84%	180,84%	
Capaian	-	-	-	-	-	180,84%	180,84%	

Dalam Pengukuran kinerja tahun 2022 KPKNL Samarinda Mempunyai 11 (sebelas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) IKU yang secara keseluruhan mempunyai persentase hasil yang cukup baik secara perspektif dan bobot.

1. Kinerja KPKNL Samarinda Tahun 2018-2022

Kinerja KPKNL Samarinda sejak tahun 2018-2022 secara garis besar dapat dikatakan cukup memuaskan meski ada beberapa target yang belum dapat tercapai khususnya pada tahun 2021. Meskipun demikian, seiring dengan mulai pulihnya perekonomian nasional, capaian kinerja KPKNL Samarinda pun semakin meningkat. Kinerja tersebut dapat dibagi dalam beberapa bidang sebagai berikut.

a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Program pengelolaan kekayaan negara merupakan suatu peran yang sangat strategis bagi DJKN pada umumnya dan KPKNL Samarinda pada khususnya. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJKN tahun 2020-2024, telah ditetapkan 4 tujuan dan 4 sasaran strategis. Peran DJKN dalam sasaran tersebut diwujudkan dengan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial.

KPKNL Samarinda juga berusaha melakukan pengelolaan negara yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *the highest and best use*. Kinerja di bidang pengelolaan kekayaan negara dapat digambarkan sebagai berikut.

Program sertifikasi tanah pemerintah tahun 2018 – 2022 sebagaimana tabel berikut.

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2018	10	17	170,00%
2	2019	46	48	104,35%
3	2020	51	51	100,00%
4	2021	82	82	100,00%
5	2022	163	172	105,52%

Tabel 1. Kinerja Sertifikasi BMN Tahun 2018 – 2022

Dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, khususnya terkait pemanfaatan barang milik negara, terdapat kegiatan pendukung berupa penilaian BMN yang dikoordinasikan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Dalam kurun waktu 2018-2022 penilaian yang dilakukan adalah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN). Selain itu juga ada penilaian terhadap barang rampasan Bea Cukai dan Barang Milik Daerah (BMD).

Hasil dari pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah berupa laporan Penilaian yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN maupun BMD.

b. Penerimaan dan Pengamanan Penerimaan Negara

Di bidang penerimaan dan pengamanan penerimaan negara ini mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor piutang negara dan juga penerimaan di sektor lelang. Ditilik dari data capaian kinerja sepanjang kurun waktu 5 tahun terakhir, dapat dikatakan kinerja KPKNL Samarinda pada tahun 2018 – 2022 cukup baik dan masih ada potensi yang dapat digali serta ditingkatkan lagi pada periode berikutnya. Adapun di sektor lelang, kinerja KPKNL Samarinda dalam kurun waktu 2018 – 2022 dapat digambarkan sebagai berikut.

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2018	40,000,000,000	548,700,391,619	1372%
2	2019	151,989,000,000	126,506,082,773	83,23%
3	2020	136,800,000,000	137,279,334,372	100,35 %
4	2021	150,000,000,000	273,087,943,996	182,06 %
5	2022	164,000,000,000	254,733,364,278	155,33 %

Tabel 2. Kinerja Capaian Pokok Lelang Tahun 2018 – 2022

Sedangkan di sektor piutang negara, kinerja KPKNL Samarinda tergambar dalam tabel berikut.

Tahun	BIAD			BKPN SELESAI		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2018	21.026.125	24.609.686	117,04	20	48	240
2019	15.988.134	46.389.073	290,15	79	145	183,54
2020	30.000.000	40.549.549	135,16	180	505	280,56
2021	35.000.000	74.671.022	213,35	400	557	139,25
2022	35.000.000	40.655.518	116,16	400	510	127,50

Tabel 3. Kinerja Piutang Negara 2018 – 2022

2. Upaya dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi organisasi dan pencapaian target kinerja, KPKNL Samarinda telah melakukan beberapa upaya selama tahun 2022 yang sejalan dengan strategi DJKN, antara lain sebagai berikut.

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial
 - 1) Optimalisasi perolehan PNBPN dari pengelolaan BMN melalui peningkatan koordinasi dengan satuan kerja yang memiliki BMN dengan kondisi rusak berat, koordinasi pelaporan penerimaan dan aset dengan potensi PNBPN, serta peningkatan pemantauan pemanfaatan BMN
 - 2) Penggalan potensi peningkatan PNBPN dari kegiatan Pengurusan Piutang Negara melalui koordinasi dengan penyerah piutang, pemanggilan kepada Debitur, pemeriksaan lapangan, dan penagihan Piutang Negara
 - 3) Penggalan potensi peningkatan PNBPN Lelang melalui pemberian imbauan kepada pemohon lelang untuk mengiklankan lelang secara optimal, pelaksanaan lelang sukarela dan lelang UMKM
- b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya
 - 1) Pelaksanaan pelayanan dan konsultasi secara daring dan luring
 - 2) Pelaksanaan lelang dengan metode *e-auction*
 - 3) Peningkatan publikasi lelang melalui media sosial untuk meningkatkan daya tarik masyarakat, termasuk media sosial pegawai sebagai *employee advocacy*
- c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien
 - 1) Peningkatan kompetensi melalui pelaksanaan *knowledge sharing* Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

- 2) Koordinasi dengan pemohon penilaian khususnya untuk data usulan nilai dari satuan kerja
- d. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien
 - 1) Pelaksanaan *Focus Group Discussion*, *In House Training*, dan imbauan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat)
 - 2) Pembangunan serta monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI menuju WBBM
 - 3) Publikasi lelang melalui media sosial untuk meningkatkan daya tarik masyarakat, termasuk media sosial pegawai sebagai *employee advocacy*

3. Evaluasi dan Analisis Keberhasilan Kinerja

Dalam implementasi/penerapan konsep *balance scorecard* visi dan misi yang telah diformulasikan, selanjutnya diterjemahkan dalam sejumlah sasaran strategis. Adapun sasaran strategis didefinisikan sebagai pernyataan tentang yang ingin dicapai (*output* dan *outcome*) dan/atau apa yang ingin dilakukan atau apa yang seharusnya kita miliki (*input*).

Peta strategis merupakan suatu panel instrumen yang memetakan sasaran strategis KPKNL Samarinda. Untuk mencapai sasaran capaian kinerja tahun 2022, KPKNL Samarinda menggunakan 4 standar perspektif *balance scorecard* yaitu *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Process*, dan *Learning & Growth*.

a. *Stakeholder Perspective* (25%)

- 1) Terhadap Sasaran Strategis Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian
 - a) Indikator Kinerja Utama Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada tahun 2022 tercapai sebesar 143,59% dari target awal sebesar 100% dengan nominal Rp17.712.286.503.00. Nilai manfaat ekonomi PNBP dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang meliputi:
 - i. Realisasi Nominal Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pengelolaan BMN;
 - ii. Realisasi Nominal Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Piutang Negara; dan
 - iii. Realisasi Nominal Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Lelang.
 - b) Indikator Kinerja Utama Persentase Produktivitas Lelang dapat terealisasi sebesar 49,45% dari target yang ditetapkan sebesar 36% yang didapat dari jumlah frekuensi lelang laku tahun 2022.

b. *Customer Perspective* (15%)

Mengukur standar penilaian kinerja terkait dengan *financial sustainability* dan yang berorientasi pada keinginan pengguna layanan. Aspek-aspek terkait hal ini antara lain sebagai berikut.

- 1) Terhadap Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
 - a) Indikator Kinerja Utama Persentase Realisasi Pokok Lelang terealisasi sebesar 155,33% dari target yang ditetapkan. KPKNL Samarinda dapat merealisasikan Pokok Lelang Kelas I sebesar Rp151.255.192.278 dari target sebesar Rp96.000.000.000. Sementara dari sektor Pokok Lelang Pegadaian terealisasi sebesar Rp103.478.172.000 dari target sebesar Rp. 68.000.000.000.

Pencapaian tersebut masih perlu ditingkatkan lagi pada periode selanjutnya. Mengetahui bahwa tahun ini pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut berdasarkan persentase gabungan dari Pokok Lelang Kelas I dan Pokok Lelang Pegadaian. Hal ini menjadi catatan tersendiri untuk KPKNL Samarinda untuk dapat memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat lebih tertarik untuk menjadikan lelang sebagai salah satu pilihan dalam bertransaksi jual beli.

Mengingat sebagian wilayah di Kalimantan Timur akan dijadikan sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. terdapat potensi akan meningkatnya minat beli masyarakat terhadap lelang di wilayah kerja KPKNL Samarinda.
 - b) Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara terealisasi sebesar Rp24.364.707.517 dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.500.000.000 dengan capaian 442,99%.
- 2) Terhadap Sasaran Strategis Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL pada KPKNL Samarinda terealisasi sebesar 4,79 dari target sebesar 4,50 yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL Samarinda diperoleh dengan melakukan survei terhadap Pengguna Layanan di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara yaitu para pemangku kepentingan/stakeholder Kementerian/Lembaga. Seksi Piutang Negara yaitu para penyerah piutang seperti perbankan/non perbankan dan penanggung utang. Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah yaitu satker Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan penilaian. dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang yaitu para pemohon lelang maupun pengguna jasa lelang.

Aspek penilaian dilakukan terhadap prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, staf kantor, dan kondisi kantor. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa stakeholder KPKNL Samarinda sangat puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh KPKNL Samarinda.

c. *Internal Process Perspective* (30%)

Mengukur suatu proses dalam memberikan layanan kepada *Stakeholder* dan *Customer*.

1) Terhadap Sasaran Strategi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

a) Indikator Kinerja Utama Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK mencapai 78,98% dari target awal sebesar 65%. Persentase kesesuaian penggunaan BMN yang cukup tinggi tersebut menunjukkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal. Kekayaan negara yang dioptimalkan penggunaannya meliputi:

- i. pemanfaatan kekayaan negara melalui Sewa. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Pinjam Pakai. Bangun Serah Guna (BSG). Bangun Guna Serah (BGS);
- ii. penetapan status penggunaan kekayaan negara yang meliputi penetapan status penggunaan. hibah masuk. dan penetapan aset yang berasal dari aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). aset eks. kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA). dan aset eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); dan
- iii. tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah dari konversi aset.

Keberhasilan pencapaian target tersebut juga didukung dengan upaya-upaya dalam rangka mendukung pengelolaan kekayaan negara yang optimal. antara lain:

- i. penertiban barang milik negara melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian BMN;
- ii. penyelesaian permohonan penilaian atas kekayaan negara yang akan diutilisasi; dan
- iii. peningkatan kesadaran pengguna barang agar melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan. melalui kegiatan:
 - bimbingan teknis mengenai pengelolaan BMN kepada K/L;
 - sosialisasi peraturan terkait dengan pengelolaan BMN kepada K/L; serta
 - pembinaan kepada K/L yang berkelanjutan.

b) Indikator Kinerja Utama Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipatkan dari target yang ditetapkan sebanyak 163 sertifikat, KPKNL Samarinda berhasil merealisasikan 172 Sertifikat untuk Tanah BMN.

Indeks Kinerja Utama tersebut dapat tercapai karena adanya sinergi yang baik antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda, satuan kerja terkait, dan Badan Pertanahan Nasional.

c) Indikator Kinerja Utama Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang ditargetkan sebanyak 400 KPKNL Samarinda berhasil menyelesaikan berkas BKPN Sebanyak 557 dengan indeks capaian 127,50%.

- d) Indikator Kinerja Utama Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) tercapai sebesar 104,60% dengan pelaksanaan evaluasi 214 NUP dari target 206 NUP.
- 2) Terhadap Sasaran Strategi Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional Indikator Kinerja Utama Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian mencapai hasil maksimal oleh karena tidak adanya deviasi atau deviasi sebesar 0% dari target 19%.
- 3) Terhadap Sasaran Strategi Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif
- a) Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction* terealisasi sebesar 100% dari target 92% nilai capaian sebesar 108,70% yang berasal dari Realisasi Frekuensi *E-Auction* dan Realisasi Frekuensi *E-Conventional Auction*.
- b) Indikator Kinerja Utama Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN mencapai hasil maksimal oleh karena tidak adanya deviasi atau deviasi sebesar 0% dari target 10%.
- 4) Terhadap Sasaran Strategi Edukasi yang Efektif
Indikator Kinerja Utama Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi dapat terealisasi sebesar 96,49 dari target 92 dengan indeks capaian 104,88%.
- 5) Terhadap Sasaran Strategi Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif
Indikator Kinerja Utama Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara terealisasi sebesar 92,45% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 85%.
- d. *Learning & Growth Perspective* (30%)
Menggambarkan kemampuan SDM dalam unit organisasinya untuk melakukan perbaikan dan perubahan.
- 1) Terhadap Sasaran Strategi SDM yang Kompeten
Indikator Kinerja Utama Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai mendapatkan nilai capaian yang memuaskan dari target yang ditetapkan sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100%.
- 2) Terhadap Sasaran Strategi Organisasi yang *Fit for Purpose*
- a) Indikator Kinerja Utama Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM
- b) Indikator Kinerja Utama Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja dapat terealisasi sebesar 98,13 dari target 80 dengan indeks capaian 122,60%.
- c) Indikator Kinerja Utama Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator terealisasi sebesar 99,91 dari target 90 dengan indeks capaian 111,01%.

- 3) Terhadap Sasaran Strategi Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal
 - a) Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dari target 95,5% dapat terealisasi sebesar 95,97%
 - b) Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan BMN dan Pengadaan terealisasi sebesar 180,84% dari target 100%.

4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berpedoman pada Instruksi Menteri Keuangan Nomor 346/IMK.01/2017 tentang Gerakan Efisiensi Sebagai Bagian Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan dan Instruksi Menteri Keuangan Nomor 595/IMK.01/2019 tentang Pelaksanaan Efisiensi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, dan Honorarium Jasa Profesi di Lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Samarinda secara konsisten menerapkan gerakan efisiensi terkait pelaksanaan tugas maupun anggaran birokrasi.

Seksi Kepatuhan Internal sebagai Unit Kepatuhan Internal (UKI) KPKNL Samarinda secara periodik melakukan reviu atas gerakan efisiensi yang terlaksana dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-1/MK.9/2019 tentang Pedoman *Review* Pelaksanaan Gerakan Efisiensi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Terdapat 8 (delapan) aspek efisiensi di Kementerian Keuangan, yaitu pelaksanaan lembur, percepatan layanan, pengelolaan rapat, perjalanan dinas, jamuan rapat, honorarium narasumber/tim kerja, penggunaan daya dan jasa, dan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi anggaran pada Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran, pada tahun 2022 KPKNL Samarinda mencapai efisiensi anggaran dengan nilai 80,04. Hasil tersebut diperoleh melalui keberhasilan KPKNL Samarinda dalam mengelola sumber daya berupa anggaran yang optimal, efektif, dan efisien dalam melaksanakan dan mencapai target-target *output* yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022.

5. Program/Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

KPKNL Samarinda melaksanakan pembangunan ZI menuju WBBM dan berhasil memperoleh predikat WBBM pada tahun 2022. Berbagai kegiatan dan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Samarinda yang telah dilaksanakan dalam rangka ZI WBBM sejalan dengan pencapaian kinerja tahun 2022. Beberapa inovasi program/kegiatan penunjang capaian kinerja tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

- a. SIPESUT

Sistem Informasi Pelayanan Satu Pintu merupakan Area Pelayanan Terpadu (APT) daring KPKNL Samarinda. Memberikan kemudahan kepada pengguna layanan untuk berkonsultasi secara *online* melalui pesan ataupun Aplikasi Zoom. Dilengkapi dengan fitur layanan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang

b. SIPUAN

SIPUAN (Sistem Informasi Pengelolaan Aduan) merupakan sarana *Whistleblowing System* yang dapat dimanfaatkan bagi pihak internal maupun eksternal yang memiliki informasi dan ingin melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi pelanggaran atas kode etik, disiplin dan penyimpangan layanan oleh pegawai yang terjadi di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda.

c. QR CODE

Kumpulan Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) layanan unggulan yang meliputi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.

d. KUL.ID

Aplikasi yang berisi peraturan terkait lelang dan kalkulator perhitungan bea lelang laku bagi penjual dan pembeli sesuai dengan jenis dan tarif yang berlaku.

e. LUNASWAL

Aplikasi pencatatan pembayaran utang serta saldo hutang sebagai pengingat dan memudahkan *stakeholders* dalam memonitor pembayaran pembayaran utang serta saldo hutang.

f. KONSUMEN PKN

Aplikasi *tracking* surat agar memudahkan *stakeholders* mengetahui perkembangan surat yang telah disampaikan kepada KPKNL Samarinda.

g. SLOPKN

Formulir survei lapangan kekayaan negara berbasis digital untuk tanah, bangunan, kendaraan, peralatan/ mesin, dan lainnya.

h. WADAH BABINCANG

Acara bincang santai sebagai sarana konsultasi dan edukasi bagi pengguna layanan khususnya pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang yang dilaksanakan rutin bulanan.

Berbagai inovasi yang digagas dan dilaksanakan dalam bentuk aplikasi maupun program/kegiatan tersebut menjadi pendorong percepatan layanan KPKNL Samarinda kepada *stakeholders*.

6. Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Dalam menjaga efektivitas kinerja dalam mencapai target kinerja, KPKNL Samarinda melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko setiap triwulan. Kegiatan ini salah satunya bertujuan untuk mengevaluasi hasil kinerja dan tindakan yang telah dilaksanakan atau direncanakan pada periode sebelumnya, menyusun rencana aksi, serta memetakan profil risiko KPKNL Samarinda.

Beberapa risiko yang telah dimitigasi beserta tindak lanjut penanganannya antara lain sebagai berikut.

- a. Untuk risiko banyaknya piutang negara yang tidak dapat ditagih dikarenakan BKPN tidak disertai dengan barang jaminan sehingga tidak tercapainya target kinerja penurunan *outstanding* piutang (penurunan kinerja), Seksi Piutang Negara telah melakukan SMS *Blast* ke debitur setiap awal bulan, melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kondisi kemampuan debitur dan keberadaan debitur, dan melakukan penagihan melalui surat panggilan.
- b. Untuk risiko pelaksanaan lelang tidak ada peminat dikarenakan barang yang dilelang tidak *marketable* dan kurangnya informasi pelaksanaan lelang sehingga tidak tercapainya target bea lelang dan produktivitas lelang (penurunan kinerja), Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang telah melakukan penggalan potensi lelang, sosialisasi lelang, penetapan lelang yang berpotensi laku, mengimbau kepada setiap pemohon lelang untuk membantu mengiklankan lelang, dan melaksanakan lelang sukarela khususnya UMKM.
- c. Untuk risiko tahapan pengurusan piutang negara tidak dapat terlaksana secara optimal dikarenakan umur piutang yang sudah lama, tidak didukung barang jaminan, keberadaan debitur tidak diketahui, dokumen pendukung yang tidak lengkap, dan penolakan pembayaran oleh debitur sehingga banyaknya *outstanding* piutang yang belum diselesaikan (penurunan kinerja), Seksi Piutang Negara telah melakukan penagihan dan pemeriksaan terkait piutang pada debitur, melakukan survei lapangan, dan melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara terkait berkas PSBDT.

7. Rencana Aksi

Di samping mendukung dan memanfaatkan isu strategis pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur untuk menjaring minat masyarakat untuk mengikuti lelang terutama di bidang properti dan memaksimalkan pengelolaan aset di Kota Samarinda sebagai daerah penyangga Ibu Kota yang baru, pada tahun 2023 KPKNL Samarinda akan melanjutkan penggalan potensi pemanfaatan BMN dan wasdal terutama terhadap sewa yang jatuh tempo dan koordinasi ke satuan kerja yang mempunyai BMN Rusak Berat serta segera mengidentifikasi dan menetapkan target sertifikasi tahun 2023. Dari segi pelaksanaan lelang, akan dilakukan penggalan potensi lelang pada beberapa pengadilan, kejaksaan, dan kurator yang pernah mengajukan lelang di KPKNL Samarinda, serta akan melanjutkan lelang sukarela khususnya UMKM. Selanjutnya, dari segi Piutang Negara penagihan piutang Negara di atas 500 juta akan menjadi prioritas KPKNL Samarinda di tahun 2023.



B. REALISASI ANGGARAN

Dengan berakhirnya proses e-Rekon & LK KPKNL Samarinda, berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2022 terhitung realisasi belanja unit KPKNL Samarinda pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp1.663.059.739,00** atau **90,27%** dari total pagu revisi dalam DIPA KPKNL Samarinda sebesar **Rp1.842.358.000,00**.

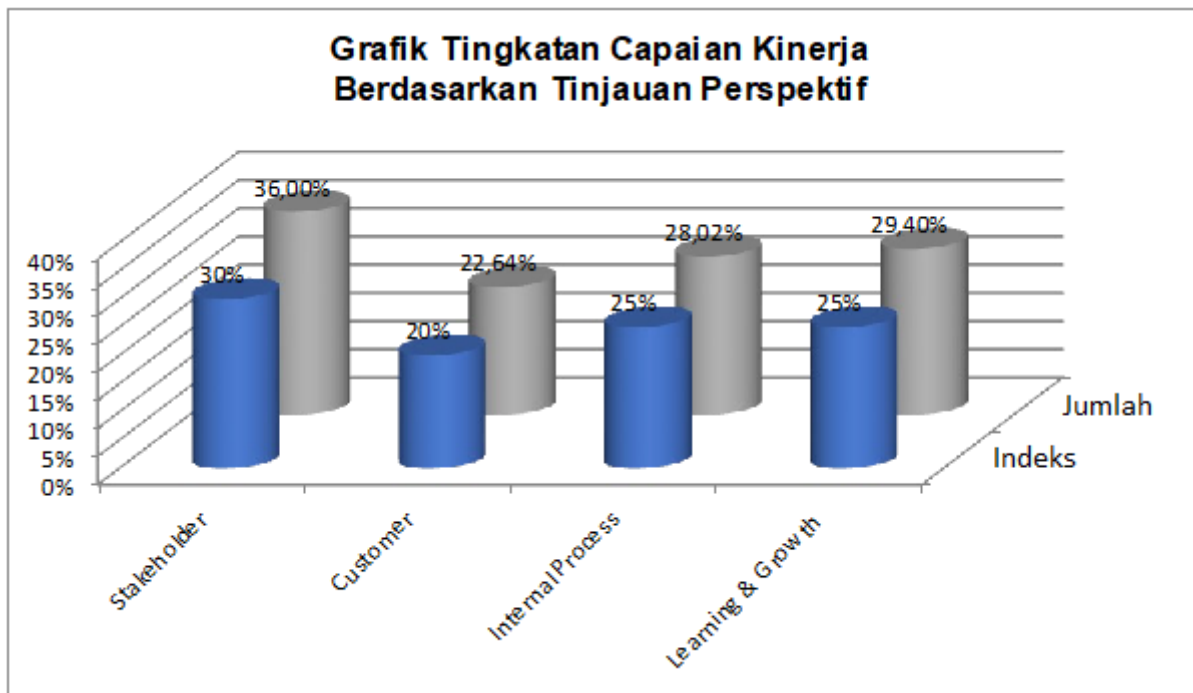
Realisasi anggaran tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut.

Program/Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi
Jumlah Seluruhnya	Rp1.842.358.000	Rp1.663.059.739
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp204.912.000	Rp139.360.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp10.156.000	Rp600.000
2. Pengelolaan Aset	Rp194.756.000	Rp138.760.000
Dukungan Manajemen	Rp1.637.446.000	Rp1.523.699.739
5. Legislasi dan Litigasi	Rp6.580.000	Rp4.023.500
6. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.616.674.000	Rp1.510.856.239
7. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp3.920.000	Rp500.000
8. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp10.272.000	Rp8.320.000

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda tahun 2022 ditetapkan sesuai dengan Peta 1 Kemenkeu *Three DJKN* yang terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil evaluasi kinerja apabila dilihat dari tinjauan perspektif dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini.



Gambar 3. Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 Berdasarkan Tinjauan Perspektif

NO	PERSPEKTIF	INDEKS	JUMLAH
1	<i>Stakeholder Perspective</i>	30%	36,00%
2	<i>Customer Perspective</i>	20%	22,64%
3	<i>Internal Proses Perspective</i>	25%	28,02%
4	<i>Learning & Growth Perspective</i>	25%	29,40%
JUMLAH CAPAIAN KINERJA		100%	116,06%

Tabel 4. Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 Berdasarkan Tinjauan Perspektif

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dilihat pada grafik dan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian sasaran tahun 2022 adalah **116,06%**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja KPKNL Samarinda tahun 2022 secara rata-rata telah melampaui indeks yang ditetapkan. Dengan tercapainya realisasi *stakeholder perspective* tercapai sebesar 36,00% dapat diartikan bahwa tujuan utama organisasi terutama dalam peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan, sejalan dengan capaian *customer perspective* tercapai sebesar 22,64% dalam pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa yang berpengaruh pada kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Demikian pula dengan realisasi *internal process perspective* sebesar 29,02% dan *learning & growth perspective* sebesar 29,40%, menandakan bahwa proses investasi yang berupa peningkatan SDM, anggaran yang maksimal, serta pelaksanaan proses organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku telah mendukung keberhasilan tujuan organisasi.

B. HAMBATAN DAN HARAPAN

Hambatan dan harapan yang ditemui oleh KPKNL Samarinda sepanjang periode tahun 2022 terutama dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

- a. Terdapat bidang tanah APT Bandara Pranoto yang berada wilayah Kutai Kartanegara tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak adanya akta/surat pelepasan hak ke negara dari Pemberi Hibah/Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- b. Terdapat 2 bidang tanah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang tidak dapat ditindaklanjuti karena berkas tidak lengkap dan permasalahan pencatatan di satuan kerja
- c. Terdapat beberapa bidang tanah yang terindikasi *overlapping*
- d. Untuk SHP yang belum sesuai ketentuan, masih perlu dilakukan *ploting* titik koordinat, dan tidak adanya kejelasan terkait penyelesaian SHP yang belum sesuai ketentuan pada Kantor Pertanahan

2. Seksi Piutang Negara

- a. Nilai hutang di atas 500 juta sehingga memerlukan pemeriksaan Piutang Negara sebelum dilakukan PSBDT
- b. Kebanyakan debitur tidak diketemukan keberadaannya sehingga terkendala melakukan penagihan dan pelunasan

3. Pelayanan Lelang

- a. Adanya permasalahan hukum terhadap objek lelang
- b. Objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan yang masih dikuasai oleh debitur

- c. Harga limit yang ditetapkan oleh penjual masih banyak yang berpatokan pada nilai Hak Tanggungan (Nilai Pasar) yang terlalu tinggi, bukan berdasarkan dari Nilai Likuidasi
- d. Kurangnya pemasaran oleh penjual terhadap objek lelang itu sendiri

Harapan terhadap kendala di atas adalah adanya kepastian hukum terhadap objek lelang sehingga mengundang minat calon pembeli. Penjual dalam menetapkan nilai limit didasarkan pada nilai likuidasi serta lebih aktif melakukan pemasaran. Selain itu, dimulainya pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara diharapkan dapat mempengaruhi minat beli masyarakat terhadap properti. Potensi melonjaknya minat masyarakat akan properti dapat dimanfaatkan oleh KPKNL Samarinda sebagai salah satu bahan untuk mempromosikan lelang ke masyarakat luas.

Langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan KPKNL Samarinda dalam meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, adalah dengan melanjutkan pelaksanaan penggalian potensi lelang baik melalui surat maupun kunjungan ke lapangan dan melakukan monitoring dan evaluasi lelang melalui peninjauan dan atau pengawasan langsung terhadap pelaksanaan lelang secara intensif. Selain itu koordinasi dengan satuan kerja terkait monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPKNL Samarinda akan semakin ditingkatkan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini, kami harapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Samarinda, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja (LAKIN) tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi. Secara eksternal, Laporan Kinerja (LAKIN) harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*. Dengan demikian pada akhirnya DJKN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional.

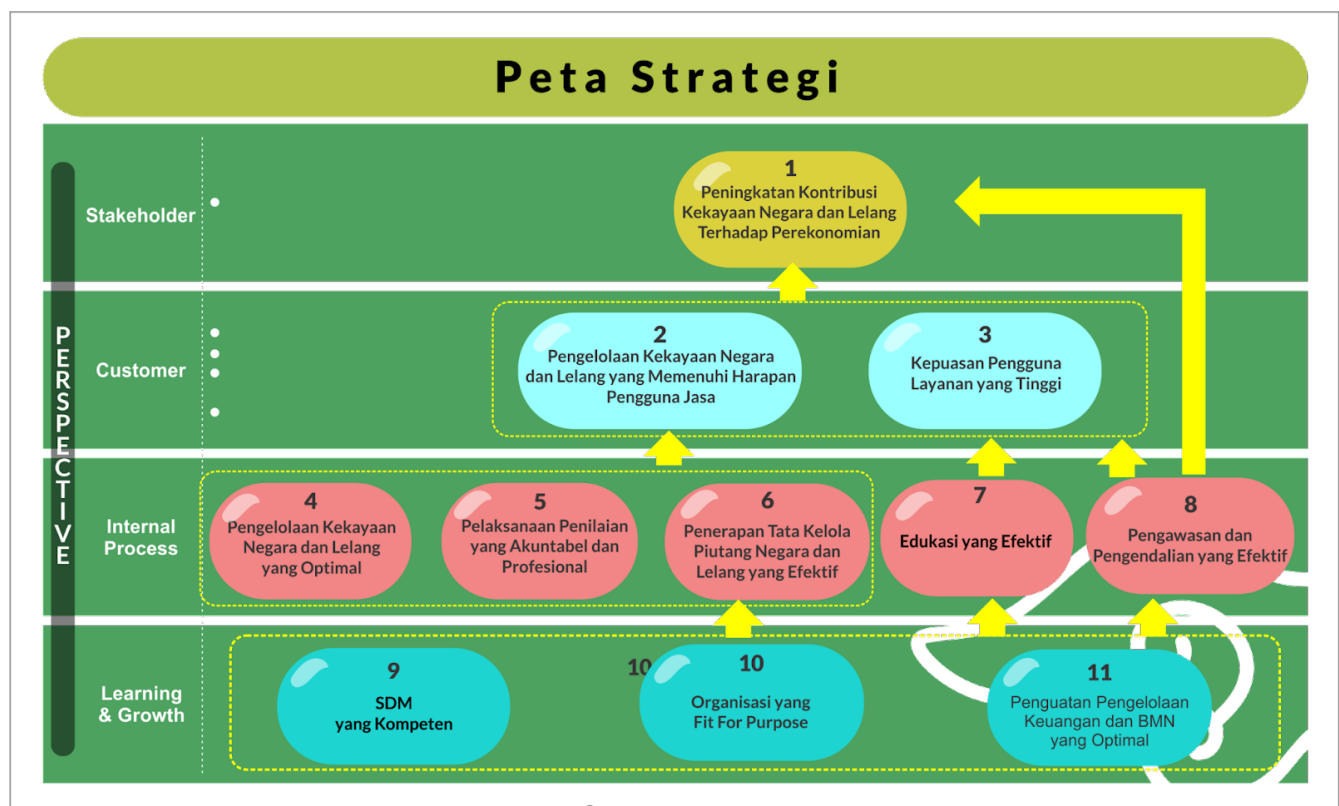


**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 8.1/KN.25/2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SAMARINDA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Samarinda, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



9



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SAMARINDA
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,5 (Skala 5)
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
9	SDM yang Kompeten	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
		10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%



Kegiatan	Anggaran
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 190.828.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 10.156.000
2. Pengelolaan Aset	Rp 180.672.000
Program Dukungan Manajemen	Rp 1.637.446.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 6.580.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.616.674.000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 3.920.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 10.272.000

Samarinda, 13 April 2022

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Kalimantan Timur dan Utara

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Samarinda



Ditandatangani Secara Elektronik
Kusumawardhani



Ditandatangani Secara Elektronik
Bagus Kurniawan



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SAMARINDA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	-	6,6%	6,6%	26,6%	26,6%	66,6%	66,6%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	-	25%	25%	30%	30%	36%	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	8,08%	8,08%	28,08%	28,08%	58,08%	58,08%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	-	7,46%	7,46%	32,46%	32,46%	57,46%	57,46%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,5	4,5
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	-	17,91%	17,91%	37,91%	37,91%	77,91%	77,91%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	-	18,25%	18,25%	43,25%	43,25%	68,25%	68,25%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	24%	24%	59%	59%	84%	84%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	92%	92%	92%	92%	92%	92%
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	-	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Edukasi yang Efektif							
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	92	92	-	92	92	92
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	-	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose							
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	-	-	-	-	-	85	85
10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	90	90	90	90	90	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	100%	100%

Samarinda, 13 April 2022

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Bagus Kurniawan



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q2 Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Laporan Kegiatan Monitoring	Q2 s.d. Q4	Seksi PKN	-
				Q3 Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Samarinda, 13 April 2022

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
 Bagus Kurniawan

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal «Tanggal Penandatanganan»



Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN
13 April 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Bagus Kurniawan	NAMA	Kusumawardhani
NIP	198208212003121002	NIP	196908231996032001
PANGKAT/GOL RUANG	Penata Tingkat I, III/d	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Samarinda	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	66,6%
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase produktivitas lelang	36%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	58,08%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	57,46%
5	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,5
6	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
7	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipatkan	77,91%
8	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	68.25%
9	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	84%
10	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
11	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
12	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%
13	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92
14	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
15	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
16	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
17	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80



18	Organisasi yang Fit For Purpose	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
19	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
20	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

B. KINERJA TAMBAHAN

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Bagus Kurniawan
NIP 198208212003121002

Samarinda, 13 April 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Kusumawardhani
NIP 196908231996032001



NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2022

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
Stakeholder Perspective(25%)								30.00%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							120.00%	
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	143.59%	14%	50%	143.594%	120.00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	49.45%	14%	50%	137.36%	120.00%	hijau
Customer Perspective(15%)								16.98%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120.00%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	155.33%	14%	50%	155.33%	120.00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	442.99%	14%	50%	442.99%	120.00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							106.44%	
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	E/M	4.50	4.79	21%	100%	106.44%	106.44%	hijau
Internal Process Perspective (30%)								33.62%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							112.34%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	78.98%	14%	24%	121.51%	120.00%	hijau
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	P/L	100%	105.52%	19%	33%	105.52%	105.52%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	127.50%	14%	24%	127.50%	120.00%	hijau
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/H	100%	104.60%	11%	19%	104.60%	104.60%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120.00%	
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	P/M	19%	0.00%	14%	100%	200.00%	120.00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114.35%	
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	P/M	92%	100.00%	14%	50%	108.70%	108.70%	hijau
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	10%	0.00%	14%	50%	200.00%	120.00%	hijau
7	Edukasi yang Efektif							104.88%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	92	96.49	14%	100%	104.88%	104.88%	hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							108.77%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	92.45%	14%	100%	108.77%	108.77%	hijau
Learning & Growth Perspective (30%)								34.54%	
9	SDM yang kompeten							120.00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120.00%	14%	100%	120.00%	120.00%	hijau
10	Organisasi yang fit for purpose							115.20%	
10a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	P/M	85	97.39	14%	33%	114.58%	114.58%	hijau
10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	P/M	80	98.13	14%	33%	122.66%	120.00%	hijau
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90	99.91	14%	33%	111.01%	111.01%	hijau
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							110.25%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95.5%	95.97%	14%	50%	100.49%	100.49%	hijau
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	180.84%	14%	50%	180.84%	120.00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								115.15%	hijau

Mengetahui,
Kepala KPKNL Samarinda
Selaku Submanajer Kinerja



datangani secara elektronik
 Bagus Kurniawan

Kepala Seksi Kepatuhan Internal
Selaku Administrator Kinerja Organisasi



Ditandatangani secara elektronik
 Wirta

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
TAHUN 2022

SS	IKU	V/C	Uraian IKU	Target Tahun 2022	Realisasi						
					Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1			Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian								
	1a-CP	P/M	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	MAX/TLK							
	a.		PNBP Pengelolaan BMN	Rp 6,500,000,000	Rp 1,268,128,142	Rp 2,965,080,937	Rp 2,965,080,937	Rp 5,348,328,440	Rp 5,348,328,440	Rp 9,333,957,348	Rp 9,333,957,348
	b.		PNBP Piutang Negara	Rp 35,000,000	Rp 5,391,404	Rp 12,632,458	Rp 12,632,458	Rp 27,854,301	Rp 27,854,301	Rp 40,655,518	Rp 40,655,518
	c.		PNBP Lelang	Rp 5,800,000,000	Rp 2,846,931,308	Rp 5,712,276,823	Rp 5,712,276,823	Rp 6,510,036,824	Rp 6,510,036,824	Rp 8,337,673,637	Rp 8,337,673,637
			Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp 12,335,000,000	Rp 4,120,450,854	Rp 8,689,990,218	Rp 8,689,990,218	Rp 11,886,219,565	Rp 11,886,219,565	Rp 17,712,286,503	Rp 17,712,286,503
	Capaian IKU				33.40%	70.45%	70.45%	96.36%	96.36%	143.59%	143.59%
	1b-CP	P/M	Persentase produktivitas lelang	MAX/TLK							
			Jumlah Lot lelang Laku + lelang wanprestasi		86	170	170	260	260	403	403
			Jumlah Lot lelang Laku + lelang wanprestasi + lelang TAP		196	369	369	566	566	815	815
	Capaian IKU				43.88%	46.07%	46.07%	45.94%	45.94%	49.45%	49.45%
2			Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
	2a-CP	P/M	Persentase realisasi pokok lelang	MAX/TLK							
			Pokok Lelang Kelas I	Rp 96,000,000,000	Rp 56,507,992,578	Rp 115,009,481,055	Rp 115,009,481,055	Rp 122,832,992,544	Rp 122,832,992,544	Rp 151,255,192,278	Rp 151,255,192,278
			Pokok Lelang Pegadaian	Rp 68,000,000,000	Rp 12,235,538,300	Rp 37,256,886,500	Rp 37,256,886,500	Rp 61,895,394,100	Rp 61,895,394,100	Rp 103,478,172,000	Rp 103,478,172,000
			Target/Realisasi Pokok Lelang	Rp 164,000,000,000	Rp 68,743,530,878	Rp 152,266,367,555	Rp 152,266,367,555	Rp 184,728,386,644	Rp 184,728,386,644	Rp 254,733,364,278	Rp 254,733,364,278
	Capaian IKU				41.92%	92.85%	92.85%	112.64%	112.64%	155.33%	155.33%
	2b-CP	P/M	Persentase Penurunan outstanding piutang negara	MAX/TLK							
			Target/Realisasi	Rp 5,500,000,000	Rp 2,339,915,870	Rp 4,047,894,306	Rp 4,047,894,306	Rp 7,940,904,790	Rp 7,940,904,790	Rp 24,364,707,517	Rp 24,364,707,517
	Capaian IKU				-	42.54%	73.60%	144.38%	144.38%	442.99%	442.99%
3			Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi								
	3a-CP	E/M	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	MAX/TLK							
			Target/Realisasi	4.50						4.79	4.79
	Capaian IKU									4.79	
4			Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal								
	4a-CP	P/M	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%							
			a. Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2022)	Bobot 75%	27.60%	74.10%	74.10%	79.46%	79.46%	77.21%	77.21%
			b. Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2021 & 2020	Bobot 25%	81.05%	61.54%	61.54%	100.00%	100.00%	84.30%	84.30%
	Capaian IKU				40.96%	70.96%	70.96%	84.60%	84.60%	78.98%	78.98%
	4b-CP	P/L	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	MAX/TLK							
			Target/Realisasi	163	36	55	55	112	112	172	172
	Capaian IKU				22.09%	33.74%	33.74%	68.71%	68.71%	105.52%	105.52%
	4c-CP	P/M	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	MAX/TLK							
			Target/Realisasi	400	127	259	259	465	465	510	510
	Capaian IKU				31.75%	64.75%	64.75%	116.25%	116.25%	127.50%	127.50%
	4d-CP	P/H	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	MAX/TLK							
			Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya	50	16	35	35	49	49	53	53
			Jumlah aset yang disusun dan disampaikan rekomendasinya	156	0	108	108	127	127	161	161
	Capaian IKU				206	16.00%	69.62%	69.62%	89.71%	89.71%	104.60%

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
TAHUN 2022

SS	IKU	V/C	Uraian IKU	Target Tahun 2022	Realisasi						
					Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5			Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional								
	5a-CP	P/M	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	MIN/TLK							
			Target/Realisasi	19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Capaian IKU		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6			Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
	6a-CP	P/M	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	MAX/TLK							
			Jumlah realisasi Frekuensi e-Auction		119	209	209	331	331	461	461
			Jumlah realisasi Frekuensi e-Conventional Auction		0	0	0	0	0	1	1
			Jumlah realisasi pelaksanaan lelang		119	209	209	331	331	462	462
			Capaian realisasi e-Auction		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.78%	99.78%
			Capaian Realisasi e-Conventional Auction		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%	0.22%
			Capaian IKU		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	6b-CP	P/M	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	MIN/TLK							
	a		Deviasi Data PNPB Lelang	10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	b		Deviasi Data PNPB Piutang Negara	10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Rata-Rata Target	10%							
			Capaian IKU		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7			Edukasi yang efektif								
	7a-N	P/M	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	MAX/AVG							
			Target/Realisasi	92		96.08	96.08		96.08	96.89	96.49
			Capaian IKU	-		96.08	96.08		96.08	96.89	96.485
8			Pengawasan dan pengendalian yang efektif								
	8a-CP	P/M	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	MAX/TLK							
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L		23	24	24	24	24	24	24
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L		0	6	6	21	21	25	25
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021		25	25	25	25	25	25	25
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2022		7	22	22	28	28	28	28
			Capaian IKU		71.88%	63.83%	63.83%	84.91%	84.91%	92.45%	92.45%
9			SDM yang kompeten								
	9a-N	P/M	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX/TLK							
			Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria		8	16	16	23	23	24	24
			Jumlah bawahan total		27	27	27	23	23	24	24
			% Capaian Utama		29.63%	59.26%	59.26%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
			Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria		7	15	15	23	23	24	24
			Jumlah bawahan total		27	27	27	23	23	24	24
			% Capaian Tambahan		25.93%	55.56%	55.56%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
			Capaian IKU		34.81%	70.37%	70.37%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
TAHUN 2022**

SS	IKU	V/C	Uraian IKU	Target Tahun 2022	Realisasi						
					Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Organisasi yang fit for purpose										
	10a-N	P/M	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	MAX/TLK							
			Target/Realisasi	85						97.39	97
	Capaian IKU			-						114.58%	114.58%
	10b-N	P/M	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	MAX/TLK							
			Target/Realisasi	80						98.13	98
	Capaian IKU			-						122.66%	122.66%
	10c-N	P/M	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	MAX/AVG							
			Target/Realisasi	90		99.90	99.90	99.87	99.89	99.96	99.91
	Capaian IKU			-	0.00	99.90	99.90	99.87	99.89	99.96	99.91
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal										
	11a-CP	P/M	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	MAX/TLK							
			Target/Realisasi	95.5%	100.00%	99.92%	99.92%	99.95%	99.95%	95.97%	95.97%
	Capaian IKU			-	100.00%	99.92%	99.92%	99.95%	99.95%	95.97%	95.97%
	11b-N	P/L	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	MAX/TLK							
	a.		Target/Realisasi	100%						180.84%	180.84%
	Capaian IKU			-						180.84%	180.84%

Mengetahui,
Kepala KPKNL Samarinda



Ditandatangani secara elektronik
Bagus Kurniawan

Samarinda, 09 Januari 2023
Kepala Seksi Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik
Wirta



